KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kurangi beban dosen, publikasi jurnal ilmiah jangan memberatkan
Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kurangi Beban Dosen

Publikasi Jurnal Ilmiah Jangan Memberatkan

FOTO: DPR.GO.ID



Ferdiansyah

ANGGOTA Komisi X DPR Ferdiansyah mendorong Pemerintah mengevaluasi beban administrasi dan kewajiban publikasi ilmiah dosen, termasuk tuntutan publikasi di jurnal terindeks dalam *database* Scopus. Buku berbasis riset bisa jadi alternatif luaran ilmiah yang diakui dalam pemenuhan kewajiban akademik tanpa mengesampingkan kualitas dan akuntabilitas penelitian.

Menurutnya, penyederhanaan administrasi dan perluasan bentuk luaran akademik diperlukan agar dosen dapat lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Pasalnya, banyak dokumen administrasi yang mesti disiapkan dosen. Bahkan, tebalnya hingga setengah jengkal yang justru berpotensi menghambat keterlibatan praktisi profesional dalam mengajar di perguruan tinggi.

Di saat yang sama, kata Ferdiansyah, dosen juga masih menghadapi tuntutan penelitian dan juga publikasi ilmiah yang jadi bagian dari kinerjanya di kampus. Padahal, proses penelaahan naskah oleh jurnal membutuhkan waktu lama. "Sementara sebagian penerbit membebankan biaya publikasi, sehingga menambah tantangan bagi dosen," terangnya, Rabu (21/10/2026).

Untuk itu, dia meminta Pemerintah membuka ruang bagi bentuk karya ilmiah lain yang tetap memenuhi standar akademik yang berlaku. Penilaian terhadap produktivitas ilmiah dosen tidak seharusnya hanya bertumpu pada publikasi jurnal. Penilaiannya juga perlu mempertimbangkan buku riset yang disusun berdasarkan hasil penelitian secara jelas.

Buku berbasis riset, sambungnya, berpotensi memberikan manfaat akademik yang jauh lebih luas bagi dunia pendidikan tinggi saat ini. "Selain jadi rujukan pembelajaran serta memperkaya literatur, buku juga bisa memberikan peluang besar bagi penulis untuk memperoleh hak cipta dan royalti dari karya," katanya.

Isu terkait pengakuan luaran akademik ini juga jadi perhatian serius anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa. Pasalnya, penilaian kinerja akademik tentu perlu mempertimbangkan karakteristik bidang ilmu. Secara khusus, perguruan tinggi seni yang menghasilkan karya berbeda dari penelitian konvensional seperti lukisan atau tari.

Karya seni dan portofolio, kata Ledia, perlu memperoleh ruang yang luas dalam sistem penilaian akademik di kampus. "Pendekatan yang sesuai dengan karakter keilmuan sangat diperlukan agar kontribusi perguruan tinggi seni tidak hanya diukur melalui indikator publikasi yang lazim digunakan pada bidang akademik lainnya," ujarnya. ■ PYB